

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Menurut Mardiasmo (2005 :114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasapemerintah secara elektronik.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengadaan barang/jasa secara konvensional menghasilkan sisi negatif, antara lain : suap untuk memenangkan tender, proses tender tidak transparan, kurangnya persaingan sehat diantara penyedia, pencantuman spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang (Udoyono, 2012).

Dalam proses pengadaan sering terjadinya kegagalan Pemilihan pemenang salah satunya tender ulang Dengan tender ulang mengakibatkan fungsi pemanfaatan anggaran. Proses pemilihan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi dilakukan oleh kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi perusahaan akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang yang akan berdampak pada buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan.

UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa usaha konstruksi mensyaratkan bahwa pemilihan jasa konstruksi dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas melalui suatu persaingan yang sehat untuk mendapatkan penyedia jasa konstruksi/kontraktor yang andal dan mampu menghasilkan bangunan yang berkualitas dan sesuai spesifikasi, jangka waktu dan biaya yang ditetapkan

Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.

Jumlah pelelangan tender proyek pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 , 2015, 2016,2017, 2018 dan 2019 yang dilakukan dengan metode pelelangan pascakualifikasi sebanyak 953 paket pekerjaan dan tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tabel 1. 1Jumlah Penyebaran Lelang di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tender		
Jenis Tender	Tender Ulang	Tahun Pengadaan
Pengadaan barang	34	2014-2019
Pekerjaan Kontruksi	137	
Jasa Konsultasi badan Usaha	47	
Jasa Konsultasi Perorangan	0	
Jasa Lainnya	15	
Jumlah Total Tender Ulang	248	
<i>Jumlah Tender</i>	<i>953</i>	

Sumber : LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020

Proses pemilihan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi dilakukan oleh kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran dan

kualifikasi perusahaan akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang yang akan berdampak pada buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan.

Objek penilaian ini meliputi faktor- faktor Kualifikasi, Administrasi, Teknis, Harga, dan Dokumen Lainnya yang mempengaruhi pemilihan pemenang lelang/kontraktor pelaksana jasa konstruksi di kabupaten kepulauan Mentawai dan mencari faktor yang paling dominannya.

1.2 Rumusan masalah

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tender ulang ?
2. Bagaimana pengaruh Pokja terhadap proses lelang sehingga terjadinya tender ulang ?
3. Apakah kemampuan kontraktor mempengaruhi proses lelang sehingga terjadinya tender ulang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini diantara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penting yang dapat menimbulkan Tender ulang dalam proses pelelangan atau tender di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui kompetensi Pokja dalam proses pengadaan lelang sehingga tidak terjadinya tender ulang pada LPSE kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan Pengalaman kontraktor yang mengikuti lelang sebagai penyedia jasa dapat mempersiapkan serta memperbaiki syarat ketentuan yang ditetapkan Pokja Lelang di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau pandangan kepada kontraktor untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam proses lelang atau tender.

2. Agar dapat memberikan informasi, referensi, serta sumbangan pengetahuan bagi owner, konsultan, konsultan perencana, kontraktor, maupun kepada peneliti lain dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang sejenis.
3. Agar menjadi tinjauan ulang dalam hal perbaikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

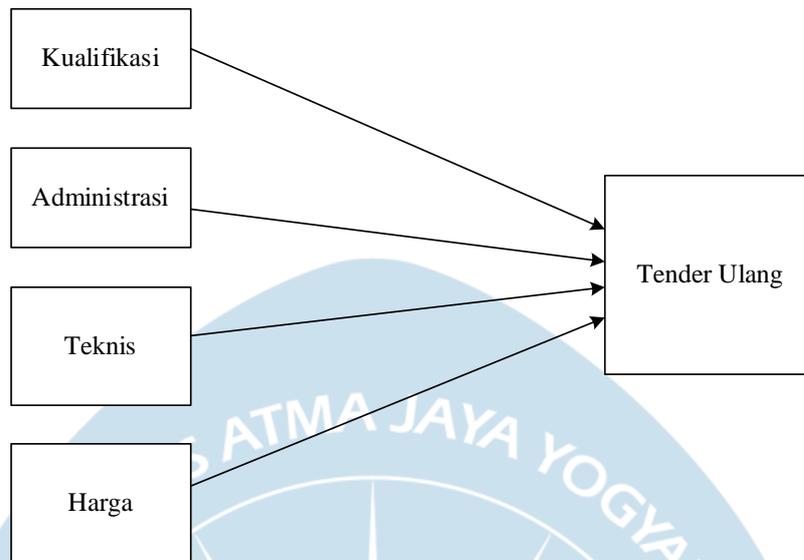
1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dibuat agar penelitian tidak jauh melebar dari topik yang dibahas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pengambilan data pada LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Penulisan ini hanya dibatasi pada kontraktor kualifikasi kecil dan menengah yang mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di LPSE kabupten Kepulauan Mentawai.
3. Primer dan Sekunder terdiri dari Pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan dari tahun 2014-2019.
4. Sampel diambil pada pengadaan barang yang mengalami tender ulang.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Tender Ulang

1.7 Hipotesis

Hipotesis (Sugiyono, 2009:96) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis memberikan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

- H1 :Kualifikasi berpengaruh terhadap Tender Ulang pada proses Lelang di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai
- H2 :Administrasi berpengaruh terhadap Tender Ulang pada proses lelang di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai
- H3 :Penawaran Teknis berpengaruh terhadap Tender Ulang pada proses Lelang di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai
- H4 :Penawaran Harga berpengaruh terhadap Tender Ulang pada proses lelang di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai